



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY SUPRIYANTA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 210069

II. DATA HARTA

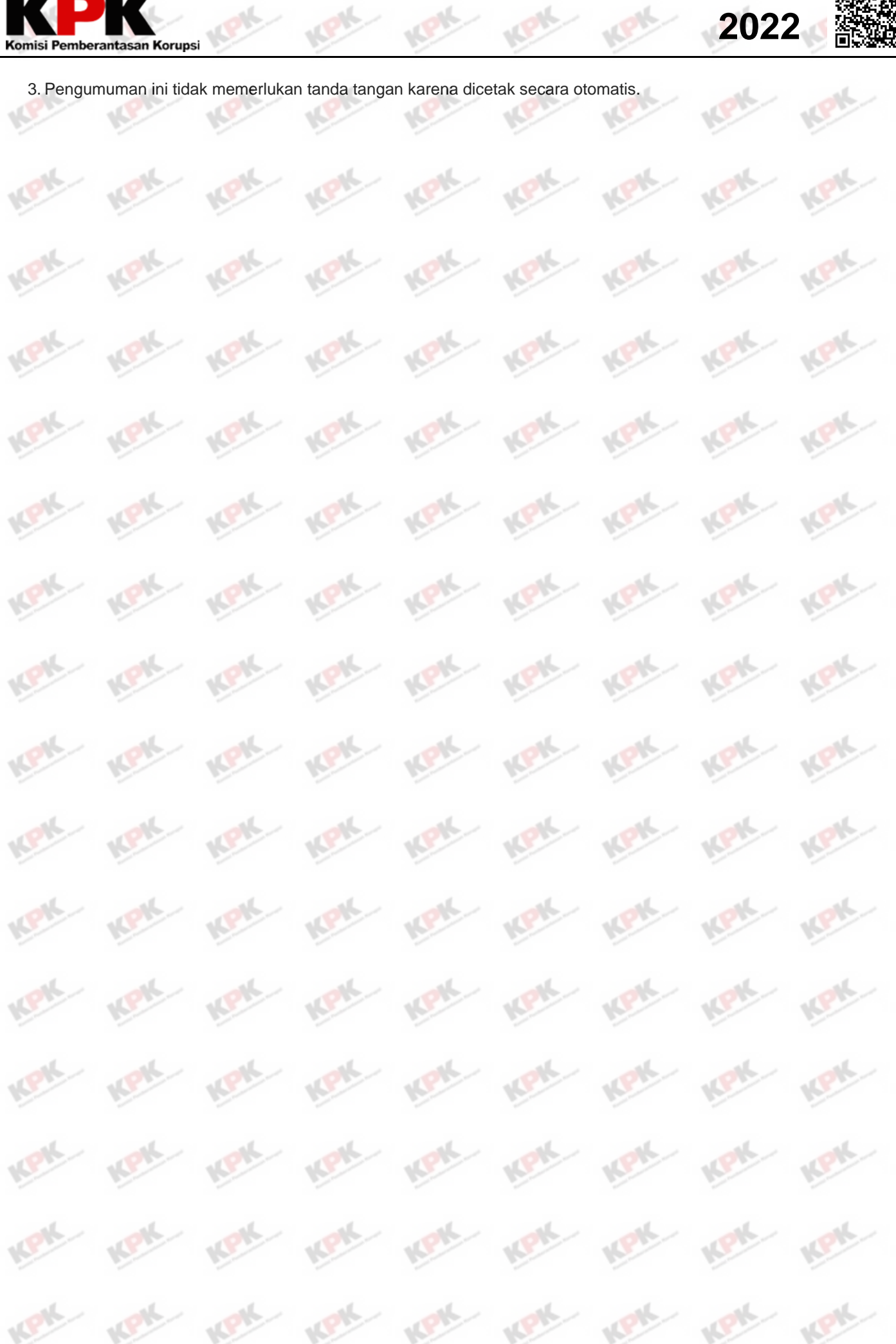
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	250.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	173.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.440.000.000
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.190.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISTYATI PURNAMA RUSDIANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 210532

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.353.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/160 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.457.500.000
2. Tanah Seluas 412 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
3. Tanah Seluas 1.058 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 456.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.223.745.524

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.928.745.524

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.928.745.524

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSADAR ARMUNANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 224604

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.674.017.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/139 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 698.352.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/95 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 975.665.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	205.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	98.805.606
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.039.522.606
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.039.522.606

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERYANA DAMAYANTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 836677

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 383 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 570.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 305.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2017, WARISAN Rp. 230.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAD LIVINA 1.5SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 45.474.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 67.521.065

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.157.995.065

III. HUTANG

Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.147.995.065

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMAWATY HATTA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
3. NHK : 836799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/264 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	135.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	103.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.848.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.848.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL LAILI HASANAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 837252

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 582.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. LAINNYA, NISSAN LIGHT TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. LAINNYA, NISSAN TRUCK TRONTON Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. LAINNYA, NISSAN TRAILER Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.312.845**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.268.312.845

III. HUTANG Rp. 201.829.920**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.066.482.925



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.